

## **PENERAPAN AUDIT KINERJA (AUDIT OPERASIONAL) PADA SEKTOR SWASTA DAN PEMERINTAH**

**Dista Amalia Arifah**

distaamalia@gmail.com

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

### **ABSTRACT**

*Operational Audit or Management Audit also called Performance Audit is an audit conducted to assess the efficiency and effectiveness the activities of an organization in the process to achieve organizational goals, the efficiency is used to assess whether the use of resources as well as an organization that is used to achieve those objectives, while the effectiveness is used to assess how well the policies of the organization to achieve goals.*

*Each type of entities would need to carry out performance audit, public sector is no exception, especially in the public sector company which main activity is public service performance assessment is of considerable concern.*

**Keywords :** *Operational Audit, Management Audit, Entities*

### **PENDAHULUAN**

Audit Operasional atau Audit Manajemen biasa juga disebut Audit Kinerja adalah audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, efisiensi digunakan untuk menilai sebaik apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efektivitas digunakan untuk menilai seberapa baik kebijakan-kebijakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua hal yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya, bisa saja suatu kebijakan organisasi itu sangat efisien akan tetapi tidak efektif begitupun sebaliknya (Syarifuddin, 2008)

Sebuah contoh kasus tentang efisiensi dan efektivitas pada sebuah perusahaan misalkan untuk menekan biaya angkut barang hasil produksi maka pihak manajemen mengeluarkan kebijakan untuk menyewa truck dari perusahaan lain yang bergerak dalam bidang penyewaan alat-alat transportasi sehingga langkah ini akan menekan biaya-biaya yang berhubungan dengan transportasi karena dulu perusahaan menggunakan truck sendiri untuk mengangkut barang jadi hasil produksi sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan erat seperti biaya suku cadang, biaya perawatan dan lain-lain,

dengan menyewa dari perusahaan lain maka pengeluaran yang harus dikeluarkan hanya sewa kendaraan perbulan, akan tetapi ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan pengiriman barang ke daerah tujuan pemasaran yang berakibat sering terjadi kekurangan pasokan barang akibatnya konsumen sering kecewa akibat barang yang dicari sering tidak ada maka mereka memutuskan untuk beralih ke produk lain, hal ini tentu saja mengakibatkan menurunnya jumlah penjualan perusahaan sehingga pendapatan perusahaan pun berkurang, dari kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil oleh perusahaan memang efisien akan tetapi tidak efektif, tentu ini hanyalah sebuah contoh sederhana yang sebenarnya terjadi mungkin tidak sesederhana contoh tersebut.

Memang dalam melakukan audit operasional hal-hal yang menjadi standar untuk menentukan hasil audit yang berguna bagi pihak manajemen puncak sangat beragam sehingga untuk menentukan sebuah standar efisiensi dan efektivitas masing-masing perusahaan bisa berbeda-beda harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi akan tetapi audit operasional atau audit manajemen penting untuk dilaksanakan karena hasil dari audit tersebut bisa berupa rekomendasi yang sangat berguna bagi pihak manajemen untuk menentukan dan menilai

kebijakan-kebijakan dan kegiatan perusahaan apakah sudah tepat atau memerlukan perbaikan sehingga akan berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan (Syarifuddin, 2008).

Setiap jenis perusahaan perlu kiranya melaksanakan audit kinerja, tidak terkecuali sektor publik, terlebih lagi pada perusahaan sektor publik yang aktivitas utamanya adalah pelayanan publik penilaian kinerja sangat diperhatikan. Mengacu pada latar belakang tersebut, pembahasan tulisan ini difokuskan pada: bagaimana konsep Audit Kinerja atau Audit Operasional, apakah terdapat perbedaan antara Perusahaan Swasta dan Sektor Publik dalam hal pencatatan pembukuan dan pertanggungjawabannya, bagaimanakah pelaksanaan Audit Kinerja atau Audit Operasional pada perusahaan swasta, serta bagaimanakah pelaksanaan Audit Kinerja atau Audit Operasional pada perusahaan sektor publik.

## PEMBAHASAN

Audit merupakan serangkaian proses yang tersistem dalam rangka mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian yang bersifat ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan yang ada, apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mempublikasikan hasilnya (Mulyadi dan Puradiredja, 1998). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap entitas baik dalam sektor publik maupun swasta perlu melakukan audit baik entitas mereka, karena audit adalah sarana pertanggungjawaban pihak manajemen entitas terhadap para stakeholdernya.

### Konsep Audit Kinerja atau Audit Operasional

Audit manajemen : pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

**Tabel 1**  
**Jenis Audit Manajemen**

<b>TIPE AUDIT</b>	<b>PELAKSANA AUDIT</b>	<b>TUJUAN AUDIT</b>	<b>PENERIMA LAPORAN</b>
Audit laporan keuangan	Auditor Eksternal	Menentukan apakah laporan auditee telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum	Pihak ketiga (investor dan kreditor)
Audit Kepatuhan	Auditor Internal atau auditor eksternal	Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana dan prosedur	Manajemen entitas yang bersangkutan, pemerintah
Audit internal	Auditor Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menilai keandalan laporan keuangan</li> <li>▪ Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas</li> <li>▪ Menilai pengendalian internal organisasi</li> <li>▪ Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya</li> </ul> Program Peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi	Manajemen dari entitas yang bersangkutan
Audit operasional (manajemen)	Auditor Eksternal atau Internal	Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	Manajemen dari entitas yang bersangkutan

### Ruang Lingkup, Sasaran dan Tujuan Audit Manajemen

- Ruang lingkup: seluruh aspek kegiatan manajemen (baik seluruh atau sebagian dari program/aktivitas yang dilakukan)
- Sasaran: Kegiatan, aktivitas, program dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik segi ekonomisasi, efisiensi, efektivitas
- Elemen Tujuan Audit :
  - Kriteria : (standar aktivitas)
  - Penyebab : (tindakan/aktivitas individu di perush)
  - Akibat : perbandingan antara penyebab dengan kriteria

### Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi audit kinerja adalah memberikan *review* independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai

apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan (BPK, 2009).

Meskipun tujuan utama audit kinerja adalah mengevaluasi efektifitas dan efisiensi organisasi, namun audit kinerja juga dapat menjangkau aspek ekonomi. Dalam konteks audit kinerja atau audit operasional, evaluasi ekonomi merupakan pertimbangan jangka panjang tentang apakah manfaat kebijakan atau prosedur lebih besar daripada biayanya.

Suatu prosedur dapat saja efektif dan efisien tetapi jangka panjang mungkin tidak ekonomis. Sebagai contoh; suatu entitas dapat memiliki kebijakan untuk mengganti biaya kendaraan bermotor karyawan. Kebijakan ini mungkin efektif sehingga memungkinkan karyawan pergi ke berbagai lokasi yang diperlukan, serta dapat dilaksanakan dengan cara yang paling efisien. Namun, dalam jangka panjang, mungkin akan lebih ekonomis apabila entitas membeli atau melease kendaraan yang dapat digunakan karyawan (Guy, *et.al*, 2003)

### Perbedaan antara Perusahaan Swasta dan Sektor Publik dalam hal pencatatan pembukuan dan pertanggungjawabannya

Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut termasuk proses Auditnya (Abdullah, 2008)

- a. Beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan, mekanisme pertanggungjawaban, standar akuntansi, pendekatan pencatatan, dan regulasi.

Perbedaan dalam hal	Sektor Swasta	Sektor Publik
1. Kepemilikan	- Dalam bisnis, kepemilikan perusahaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Modal dinyatakan dalam bentuk saham, sehingga yang disebut pemilik adalah para pemegang saham.	- Organisasi sektor public yang disebut pemerintah (daerah), dimana pemiliknya adalah masyarakat. Jadi, tidak dikenal istilah modal atau saham.
2. Mekanisme pertanggungjawaban	- Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	- Organisasi pemerintahan mekanisme pertanggung jawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan ( <i>representatives</i> ) yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat / Daerah (DPR/DPRD)

3. Standar akuntansi	- Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan	- Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan
4. Pendekatan pencatatan	- Accrual Basis	- pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran ( <i>budgetary accounting</i> ).
5. Aspek regulasi	- Tergantung kebutuhan pasar	- Organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan (dan akuntansi) pemerintahan juga akan semakin kaku pada aturan.

Sumber : Martani (2012), Halim (2007), dan Bastian (2006)

#### b. Persamaan mekanisme pencatatan Akuntansi untuk sektor swasta dan sektor publik

Sektor publik dan swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasinya. Kedua sektor menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya sehingga dituntut untuk mengelolanya secara ekonomis, efisien dan efektif. Proses pengendalian manajemen termasuk penyajian laporan keuangannya sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan sehingga kedua sektor mempunyai persamaan dalam mekanisme pencatatan akuntansi (Amilin, 2012).

Istilah Debit dan Kredit menunjukkan posisi, yakni posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua istilah ini pertanda bahwa pencatatan harus dilakukan di dua sisi (disebut *Double Entry System*). Nilai uang di sisi kiri (Debit) dan sisi kanan (Kredit) harus seimbang setiap dilakukan pencatatan (penjurnalan). Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara akuntansi bisnis dan pemerintahan.

Untuk menentukan rekening-rekening (*accounts*) yang harus didebit atau dikredit pada saat pencatatan, maka terlebih dahulu

dipahami apa yang disebut dengan persamaan akuntansi (*accounting equation*). Persamaan dasarnya diambil dari format Neraca, yakni: Aktiva = Pasiva. Jika dijabarkan lebih jauh, maka menjadi: Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Dana. Dalam bisnis tidak digunakan istilah ekuitas dana, tetapi modal pemilik (*owner's equity*).

#### c. Jenis Laporan Keuangan

Sama seperti di bisnis, laporan keuangan pemerintahan juga berjumlah 4 (empat), tetapi dengan nama yang berbeda, yakni (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Perbedaan utama LK bisnis dan pemerintah (daerah) adalah:

- Komponen LRA vs Laporan Rugi Laba (LRL). Komponen LRL ada dua (Pendapatan dan Biaya), sementara komponen LRA ada tiga (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan). Selisih antara pendapatan dan biaya/belanja di LRL disebut laba atau rugi, sementara di LRA disebut surplus/defisit. Kedua kelompok istilah ini memiliki makna berbeda.
- Komponen Neraca. Berbeda dengan Neraca dalam bisnis, rekening-rekening (*accounts*) dalam Neraca pemerintahan

memunculkan istilah baru, di antaranya Dana Cadangan, Ekuitas Dana (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan). Uniknya, jumlah yang tercantum dalam Ekuitas Dana berkaitan langsung dengan nilai yang tercantum dalam Aset (Lancar, Tetap, dan Cadangan).

- Komponen Laporan Arus Kas (LAK). Dalam bisnis, komponen LAK ada tiga (aktivitas operasi, investasi, pembiayaan) sedangkan dalam pemerintahan ada empat (aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran).
- Rugi/Laba vs Surplus/Defisit. Rugi/Laba menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya, yakni memaksimalkan keuntungan (*profits*), Sementara Surplus/Defisit menunjukkan hasil dari pelaksanaan mandat atau kewenangan oleh pemerintah (daerah) berupa anggaran (APBN/D), yang diserahkan oleh lembaga perwakilan (DPRD/D) dalam bentuk kontrak antara DPR/D dan Pemerintah (Daerah) berupa UU atau Perda. Oleh karena itu, jika dalam bisnis memperoleh Laba berarti bagus (sebaliknya: Rugi berarti jelek), maka dalam pemerintahan Surplus atau Defisit tidak berhubungan langsung dengan penilaian bagus atau jelek.

### **Pelaksanaan Audit Kinerja atau Audit Operasional pada perusahaan swasta**

Auditor Internal seringkali melakukan audit operasional untuk kepentingan organisasinya (Guy, *et.al*, 2003).

#### **a. Tujuan Audit Kinerja atau Audit Operasional**

- **Menilai Kinerja;** Setiap audit kinerja meliputi penilaian kinerja organisasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan (1) Tujuan, seperti kebijakan standar dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan, serta dengan (2) criteria penilaian lain yang sesuai.
- **Mengidentifikasi peluang perbaikan;** Auditor dapat mengidentifikasi peluang

perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu, mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, menggunakan pertimbangan professional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai.

- **Mengembangkan Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindakan Lebih Lanjut;** Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit operasional. Dalam banyak hal, auditor dapat membuat rekomendasi tertentu. Dalam kasus lainnya, mungkin diperlukan studi lebih lanjut di luar ruang lingkup penugasan, dimana auditor dapat menyebutkan alasan mengapa studi lebih lanjut pada bidang tertentu dianggap tepat.
- b. Struktur Audit Operasional (terdiri dari lima tahapan)**
- **Pengenalan;** Auditor menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur organisasi dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit, serta menentukan hubungannya dengan entitas secara keseluruhan. Selain itu auditor juga harus memahami dengan jelas tujuan dan ruang lingkup penugasan, serta sifat pelaporan yang akan diterbitkan. Auditor juga harus menentukan apakah individu atau entitas yang meminta audit tersebut memiliki otoritas untuk memberi penugasan.
  - **Survey;** Auditor harus berusaha untuk mengidentifikasi bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit.
  - **Pengembangan Program;** Disusun berdasarkan tujuan audit, yang merinci pengujian dan analisis yang harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap penting dari hasil survey pendahuluan. Disamping itu auditor juga menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan personel yang sesuai, menentukan keterlibatan personel

lainnya dalam pendahuluan, serta menelaah kertas kerja audit.

- Pelaksanaan Audit; merupakan tahap utama dari audit operasional. Auditor melaksanakan prosedur audit yang telah ditentukan dalam program audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan dan mengembangkan rekomendasi.
- Pelaporan; Laporan audit operasional pada umumnya mengandung dua unsure utama yaitu; (1). Tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan serta (2). Temuan-temuan khusus dan rekomendasi.

### **Pelaksanaan Audit Kinerja atau Audit Operasional pada Perusahaan Sektor Publik**

#### **Pengertian Kinerja Sektor Publik**

Sistem pengukuran kinerja sector public adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment. Pengukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk (Ulum, 2009) ;

- Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah → membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### **Perlunya Audit Kinerja Sektor Publik**

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat

pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Nugraha, 2010).

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

#### **Jenis Audit Sektor Publik**

1. *Audit keuangan* adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.
2. *Audit kepatuhan* adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Pada audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain kepatuhan Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan (Suharto dalam Nugraha, 2010).
3. *Audit kinerja* yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap

kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

### Struktur Audit Kinerja Sektor Publik

- Tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan *review* sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan *review* sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Tahap pengauditan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi dan telaah kepatuhan, disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. *Review* hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. *Review* ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan efisien. *Review* kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan waktu.
- Tahap pelaporan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga

legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen.

- Tahapan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan.

### Kualitas Audit Sektor Publik

Kemampuan empertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

### KESIMPULAN

1. Audit manajemen dibagi menjadi empat jenis audit dan Audit Kinerja merupakan salah satu audit manajemen. Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan.
2. Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut termasuk proses Auditnya. Meskipun demikian terdapat beberapa persamaan diantara keduanya.

3. Auditor Internal seringkali melakukan audit operasional untuk kepentingan organisasinya, struktur atau tahapan audit kinerja tidak berbeda jauh dengan audit laporan keuangan.
  4. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut.
  5. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan
- Martani, Dwi. (2012). Dampak Konvergensi IFRS Ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia Terhadap Perpajakan. Disampaikan pada Seminar Perpajakan 12/07/2012. Diakses 31 Desember 2012. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Mulyadi dan Puradiredja, Kanaka. (1998). *Auditing*. Buku Satu dan Dua. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Nugraha, Eva Putra. (2009). *Audit Sektor Publik*, diakses 19 Februari 2010, [www.google.com](http://www.google.com)
- Syarifuddin. (2008). *Audit Operasional atau Audit Manajemen*, diakses 19 Februari 2010, [www.google.com](http://www.google.com)
- Abdullah, Syukriy. (2008). *Akuntansi Pemerintahan: Perbedaan dengan Akuntansi Bisnis*, diakses 24 Januari 2010, [www.google.com](http://www.google.com)
- Ulum, Ihyaul M.D. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2012). *Konsep dan Lingkungan Akuntansi Sektor Publik*. Modul Perkuliahan Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan. (2009). *Audit Kinerja*, diakses pada 16 Februari 2010, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Guy, Dan M, C.Wayne Alderman, dan Alan J.Winters. (2003). *Auditing*, Jilid 2 Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.